

## **Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu**

**Cintantya Andhita Dara Kirana<sup>1</sup>, Rike Anggun Artisa<sup>2\*)</sup>**

<sup>1,2</sup> Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota Batu. Berkembangnya paradigma pembangunan dimana pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan membawa pengaruh pada pengelolaan desa wisata. Peneliti berupaya melihat peran aktor dan kerjasama sehingga membentuk sebuah kolaborasi dalam pengembangan desa wisata. Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.

**Kata Kunci:** desa wisata, kerjasama, aktor, *collaborative governance*.

## ***Tourism Village Development Based on Collaborative Governance in Batu City***

### **Abstract**

*This study aims to analyze the development of a tourism village based on collaborative governance in Batu City. The growth of paradigm of development which makes the government no longer the only actor has an influence on the tourism villages development. Researchers want to see the role of actors in collaborating in the development of tourist villages. The research method used is an exploratory method with a qualitative approach. The results showed that in the development of tourism villages, Batu City Government involved the private sector, academics, media and encouraged community participation through empowerment. Then in the implementation of collaborative governance, effective communication is needed to facilitate the actors to collaborate so that the actors will optimize their role in the development of tourism villages.*

**Keywords:** *tourism village, collaboration, actor, collaborative governance.*

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : rikeanggunartisa@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Suatu pembangunan dikatakan optimal ketika potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Desa yang merupakan bagian dari daerah memiliki kontribusi besar untuk kemajuan suatu daerah.

Desa dalam hal ini memiliki kontribusi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menggali potensi desa yang dimiliki dengan tujuan pengembangan dan kemajuan desa, masyarakat akan optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat

dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Dalam buku yang berjudul *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata* (Sedarmayanti, 2014) mengungkapkan bahwa kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi).

Salah satu kota di Indonesia dengan potensi pariwisata yang unggul adalah Kota Batu yang berada di Provinsi Jawa Timur. Semenjak berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2001, Kota Batu menetapkan dan memantapkan daerahnya menjadi Sentra Pariwisata dan Agropolitan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan provinsi Jawa Timur, Kota Batu diposisikan sebagai salah satu sentra pariwisata, khususnya wisata alam dan agrowisata.

Potensi agrowisata yang dimiliki Kota Batu didukung dengan letak geografis kota Batu yang berada di dataran tinggi, dimana Kota Batu merupakan suatu kota yang dikelilingi pegunungan. Kota Batu masuk dalam satuan wilayah pembangunan Malang Raya, yang didalamnya terdapat Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Pengembangan sektor pariwisata Kota Batu sangat membutuhkan daya dukung yang optimal. Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan kepariwisataan, tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasarana umum, serta fasilitas umum. Juga yang tidak kalah penting adalah sinergitas antar daerah dalam konteks pengembangan kepariwisataan, karena dengan tidak tersedianya daya dukung yang baik bagi pengembangan kepariwisataan, Kota Batu tidak dapat secara optimal mengembangkan sektor pariwisatanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor saja tetapi harus

melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan desa wisata.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Batu, peran pemerintah menjadi kunci utama. Bagaimana pola pemerintah dalam mengembangkan daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Kota Batu menerapkan *Collabrative Governance* dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

*Collaborative governance* (Jung et al., 2009) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media. Peran dari pemerintah adalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengintegrasikan program-program daerah dengan program pusat. Integrasi program-program di daerah dengan program di pusat merupakan hal yang penting karena jika tidak ada keterkaitan maka program yang dijalankan tidak ada acuan dan dasarnya. Hal tersebut lebih jauh lagi dapat menghambat proses pemantauan dari pusat ke daerah maupun pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

Peran dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuarakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-program dari komunitas masyarakat tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari program pemerintah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka program dari pemerintah tidak dapat dijalankan secara optimal. Peran dari sektor swasta adalah membantu pemerintah untuk memberikan stimulus berupa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pihak swasta sehingga pemerintah dapat mengadopsi inovasi tersebut bahkan dapat bersama-sama merumuskan suatu inovasi dalam hal pembangunan.

Sektor swasta juga memiliki andil untuk memberikan suntikan berupa hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Tentunya pihak pemerintah dapat terbantu dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam hal penyediaan modal maupun kerjasama berupa program-program pemerintah dengan sektor swasta yang dapat disinergikan seluruh sektor mendapatkan kebermanfaatan dari kerjasama yang dibangun.

Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi

sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi akan program yang telah dirumuskan pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar.

Dengan adanya media, masyarakat akan dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Salah satu aktor yang tidak kalah penting perannya dalam pembangunan adalah dari sektor akademisi. Akademisi merupakan aktor yang dibutuhkan dalam hal merumuskan suatu kebijakan dan program. Dengan dirumuskannya naskah akademik oleh akademisi yang berisi rekomendasi dan arahan kebijakan dan program berdasar pada format dan sistem yang telah diatur, maka hal tersebut akan membantu pihak pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, bukan kebijakan yang tidak berdasar pada teori.

Hal tersebut yang telah dipaparkan diatas melatar belakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam rangka membangun desa wisata di Kota Batu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis terkait pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota Batu.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Moleong, 2017) terkait proses penelitian, peneliti mengawalinya dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti menentukan metode yang tepat dan sesuai untuk memecahkan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Batu dan situs penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, observasi langsung ke lapangan serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen-dokumen perencanaan serta karya tulis seperti jurnal dan artikel ilmiah.

Kemudian, analisis data dilakukan mencakup empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai optimalnya pengembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Jika dikaitkan dengan konsep perencanaan yang dikemukakan dalam buku *Planning Theory* (Faludi, 1973) bahwa tidak ada satupun pembangunan yang berhasil tanpa adanya perencanaan yang matang. Perencanaan yang dalam prosesnya dijalankan oleh para perencana profesional akan berdampak pada hasil pembangunan yang optimal.

Dalam mengembangkan daerahnya, pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri, karena tugas dan fungsi pemerintah yang terbatas sehingga jika dikelola sendiri oleh pemerintah, pembangunan tidak dapat bersifat komprehensif. Pembangunan yang terintegratif dengan melibatkan peran aktor-aktor di dalamnya dikenal dengan konsep pembangunan berbasis *Collaborative Governance*. Seperti yang diutarakan oleh (Healey, 2003), ide tentang *Collaborative Planning* terinspirasi oleh beberapa hal yaitu

adanya persepsi tentang perencanaan sebagai sebuah proses interaktif, perencanaan dilihat sebagai sebuah aktivitas pemerintahan yang terjadi di lingkungan kelembagaan yang kompleks dan dinamis yang dibentuk oleh persepsi ekonomi, sosial dan lingkungan yang menggerakkan struktur kelembagaan tersebut.

Selanjutnya adanya inisiatif perencanaan dan kebijakan yang sangat berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas suatu ruang dan wilayah, serta adanya komitmen moral terhadap keadilan sosial yang diwujudkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari dalam konteks nilai budaya yang beragam tentang lingkungan dan cara hidup lokal.

Pariwisata diarahkan sebagai sektor andalan dan unggulan di luar migas diharapkan memberikan kontribusi yang besar peranannya sebagai (1) penghasil devisa negara, (2) mendorong pertumbuhan ekonomi nasional/daerah, (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat, (4) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (5) meningkatkan pemasaran produk nasional, (6) meningkatkan kesejahteraan, (7) memelihara kepribadian bangsa, (8)

melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait pengembangan desa wisata berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu, pemerintah Kota Batu telah menggandeng sektor swasta dan membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Kota Batu mengembangkan sektor pariwisatanya melalui pengembangan agrowisata karena Kota Batu merupakan kota yang memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata.

Agrowisata secara umum didefinisikan sebagai konsep yang mengandung suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian (Windia, 2007). Kemudian, agrowisata bila ditinjau dari aspek substansinya lebih dititikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan pertanian dan suasana pedesaan sebagai daya tarik utama wisatanya dengan tidak mengabaikan sisi kenyamanan. Pengertian ini mengacu pada ciri kegiatan wisata yang rekreatif, ditambah lagi dengan unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya dan unsur sosial ekonomi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu (Kirana, 2017), dapat diperoleh informasi bahwasannya Pemerintah Kota Batu membidik turis mancanegara melalui desa wisata di wilayahnya. Saat ini sedikitnya lima dari 12 desa yang dicanangkan sudah berjalan menjadi desa wisata. Kelima desa wisata yang sudah berjalan tersebut adalah Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Pandanrejo, serta desa Tlekung. Kelimanya memiliki potensi wisata yang berbeda.

Sebelah utara Desa Punten berbatasan dengan Desa Tulungrejo, sebelah Timur dengan Desa Sumbergondo dan Desa Bulukerto. Sebelah Selatan bersebelahan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan sebelah barat dengan Desa Gunungsari. Desa Punten membawahi empat dusun yakni Dusun Krajan, Gempol, Kungkuk, dan Dusun Payan yang terbagi dalam 8 RW dan 35 RT.

Dikutip dari artikel yang dimuat dalam <http://malang.memo-x.com/1118/kota-batu-masih-kembangkan-desa-wisata/2> diterbitkan 27 Januari 2016, dalam sejarah Kota

Batu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu hingga saat ini Kota Batu mengalami peningkatan status menjadi daerah otonomi Kota Batu. Desa Punten memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada pada pusat wilayah pengembangan Agro Wisata Kota Batu.

Dalam tatanan manajemen pemerintahan, Desa Punten telah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Berbagai infrastruktur berhasil dibangun, termasuk infrastruktur kelembagaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa, Gapungan Kelompok Tani, PKK, LPMD, BPD, Linmas, Karang Taruna dan kelembagaan masyarakat lainnya yang akan bersinergi melalui program-program kemasyarakatan. Keberadaan infrastruktur tersebut bermanfaat bagi pembangunan karena didukung oleh sumberdaya aparatur yang mumpuni dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tinggi juga merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan di desa Punten.

Dewasa ini, Desa Punten mencoba strategi baru dalam menjalankan peran dan fungsinya. Strategi tersebut diarahkan tidak hanya sekedar menonjolkan fungsi pelayanan prima, namun fokus utamanya ada pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang. Konsep yang ditawarkan dalam strategi pembangunan desa ini lebih dikenal dengan "*Entrepreneurship* Desa Punten".

Wujud nyata yang telah dilakukan antara lain pembangunan gedung serba guna untuk masyarakat umum, pasar desa, pengelolaan lembaga keuangan desa (Bank Desa), pengelolaan lapangan olahraga untuk umum, Gabungan Kelompok Tani, administrasi kelistrikan, pengembangan kampung wisata dan sebagainya. Dari sebagian konsep yang telah dijalankan tersebut, pada prinsipnya masih banyak hal yang harus dikembangkan dan diwujudkan guna menuju desa yang benar-benar mandiri dengan konsep *entrepreneurship*.

Kawasan agrowisata yang sudah berkembang memiliki kriteria-kriteria, karakter dan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kawasan agrowisata merupakan suatu kawasan yang

memiliki kriteria sebagai berikut (Hadi, 2012): 1) Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan; 2) Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi; 3) Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan.

Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata bahwa tujuan pengembangan kawasan agrowisata sendiri adalah untuk mendorong tumbuhnya visi jangka panjang pengembangan industri pariwisata, khususnya agrowisata, sebagai salah satu sarana peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam masa depan. Selanjutnya memberikan kerangka dasar untuk perencanaan dan pengembangan agrowisata secara umum serta mendorong upaya-upaya untuk pengembangan industri wisata yang terpadu berbasis kawasan dan potensi-potensi kewilayahan, sosial dan budaya daerah.

Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilakukan sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan di daerah.

Hal ini perlu mempertimbangkan antara kesesuaian lahan, budaya agro yang sudah berkembang, potensi pengembangan dan kemungkinan-kemungkinan produk-produk turunan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

Pengembangan kawasan agrowisata dimungkinkan untuk dilakukan secara lintas sektor. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk-produk wisata dan membidik celah pasar merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengembangan kawasan agrowisata secara lintas sektoral ini harus direncanakan dan dikemas secara terpadu dengan memperhatikan aksesibilitas, kemudahan dan ketersediaan berbagai fasilitas dan layanan.

Dengan semakin banyaknya pilihan produk wisata dalam suatu kawasan maka semakin besar peluang wisatawan untuk berkunjung dan mempromosikan kawasan agrowisata. Pemerintah Kota Batu melakukan upaya untuk pengembangan desa wisata. Salah satunya masing-masing desa wisata harus memiliki program unggulan yang menjadi andalan sekaligus ikon desa wisata tersebut. Sehingga suatu desa wisata memiliki kekhasan yang tidak

ditemukan pada desa lainnya. Termasuk sinkronisasi antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan dinas pariwisata terkait pengelolaan desa wisata bertaraf internasional juga merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata yang berbasis *Collaborative Governance*.

Pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu berbasis *Collaborative Governance* terdiri dari beberapa lingkup pengembangan yaitu lingkup pedoman kelembagaan adalah suatu ketentuan berupa sistem pengelolaan yang menjembatani berbagai kepentingan antara instansi terkait atau disebut protokol. Protokol diarahkan kepada pengaturan hubungan antara pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Sesuai dengan kondisi daerah dan jenis agrowisata yang dikembangkan, pihak-pihak *stakeholders* yang berkepentingan dan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan kawasan agrowisata ini antara lain, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batu, Dinas Perhubungan Kota Batu, TKPRD (Tim

Koordinasi Penataan Ruang Daerah), Provinsi Kota Jawa Timur, Kabupaten/kota, Dunia Usaha dan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Dan Lain-Lain.

Lembaga-lembaga tersebut diatas bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan agrowisata berkaitan dengan penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan. Pembangunan pusat-pusat informasi menjadi sangat penting untuk memacu pengembangan agrowisata pada umumnya. Hal ini karena kegiatan pariwisata merupakan salah satu produk unggulan non migas bagi penerimaan daerah.

Disamping itu pemerintah daerah dan sektor yang relevan bertanggungjawab terhadap perlindungan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kawasan agrowisata tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan agrowisata harus ada proses pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada instrumen yang jelas dan terukur agar monitoring kegiatan agrowisata dapat dilakukan secara optimal.

Sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat diharapkan mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Sektor swasta memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan agrowisata terutama pemasaran, penyediaan jasa dan operasional kegiatan.

Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat setempat sangat penting dan mutlak diperlukan. Kegiatan ini harus mengakomodasi dan terintegrasi dengan budaya lokal serta harus memberikan manfaat ekonomi dalam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan ketrampilan melalui pendidikan latihan agar kesempatan dan kemampuan masyarakat dapat memberikan peran yang lebih besar dalam kegiatan agrowisata.

Kerjasama dan koordinasi antar berbagai *stakeholder* terkait dalam pengembangan agrowisata sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan agrowisata. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai *stakeholder* dapat bervariasi, mulai dari informasi sampai dengan bentuk kerjasama yang formal maupun informal. Sedangkan lingkup kerjasama

juga sangat luas meliputi semua proses pengembangan agrowisata, mulai dari perencanaan seperti penetapan lokasi kawasan, pelaksanaan kegiatan termasuk operasional sampai kepada pemantauan kegiatan agar dapat dicapai sasaran secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat khususnya, sebagaimana konsep pengembangan kawasan agrowisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melakukan upaya untuk menyaring aspirasi dari beberapa aktor, sebagai praktiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sudah beberapa kali mempertemukan seluruh insan pariwisata guna membahas sinkronisasi beberapa aktor dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu. Pertemuan dengan insan wisata tersebut sekaligus untuk menentukan dan memastikan ikon dari desa wisata yang akan diangkat. Ikon tersebut merupakan suatu potensi masing-masing desa wisata yang akan menjadi ciri khas sehingga wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke desa wisata tersebut.

Informasi pendukung yang berkaitan dengan sinergitas antar aktor juga dikemukakan oleh Petugas Penyuluhan Lapangan Desa

Sumbergondo, dari hasil wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa hubungan atau sinergitas dari pemerintah desa dengan pemerintah kota Batu dilakukan melalui bantuan berupa infrastruktur seperti jalan raya juga fasilitas umum juga sarana prasarana dan juga bahan-bahan untuk pertanian seperti bibit yang unggul dan pupuk yang diberikan Dinas Pertanian dan Perhutanan kepada kelompok tani di masing-masing desa.

Dalam konsep *Collaborative Governance*, dibutuhkan pola komunikasi yang efektif agar memudahkan para aktor untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Proses untuk mencapai mufakat dan konsensus yang tercapai dengan tindakan komunikatif harus berada dalam kondisi dimana masing-masing aktor mampu menyadari adanya *interdependence of interest*, sebuah posisi kesalingtergantungan antar kepentingan yang dimiliki aktor (Innes & Booher, 2003). Dengan demikian, stakeholder yang terlibat dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya masing-masing sehingga memiliki persamaan persepsi dalam pola pengembangan yang akan dilakukan

untuk memajukan desa wisata di Kota Batu.

Dalam pengembangan kawasan agrowisata Kota Batu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga dalam perumusan program-program pembangunan diperlukan peran aktif masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat supaya kebutuhan masyarakat tersebut dapat terakomodir dalam program-program pemerintah daerah.

Kemudian, tidak hanya dari komponen masyarakat saja, pemerintah daerah membutuhkan peran perguruan tinggi terkait pengembangan daerah. Perguruan tinggi sebagai suatu wadah yang menaungi akademisi akan menjadi mitra pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam pengembangan riset di berbagai bidang termasuk dalam pengembangan agrowisata ini baik yang berkaitan dengan budidaya pertanian, peternakan, perikanan dan pengembangan wisata. penelitian dan pengembangan maupun konsultasi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Aktor selanjutnya yang juga tidak kalah penting kontribusinya dalam membantu pemerintah mengimplementasikan program-programnya, khususnya dalam hal ini adalah pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga swadaya masyarakat memiliki cukup banyak data dan informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan-bahan penunjang untuk perencanaan dan pengembangan agrowisata.

Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) dalam fungsinya sebagai wadah yang menaungi aspirasi masyarakat, dimana masyarakat dapat membuat program kemasyarakatan sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah diharapkan memiliki interaksi yang konstruktif untuk pengembangan agrowisata.

Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain dapat berperan untuk memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap program-program pemerintah khususnya tata ruang kawasan agrowisata. Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan memberikan

masukan, kritik dan saran atas pedoman tata ruang kawasan agrowisata yang ada dan sedang berjalan, sehingga diharapkan akan memberikan *feed back* yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Selain pentingnya keterlibatan aktor-aktor tersebut, pembinaan dan sosialisasi ditujukan kepada para masyarakat dan dunia usaha yang menjadi subjek dan objek dari pengembangan kawasan agrowisata juga penting. Tolak ukur keberhasilan pembinaan dan sosialiasi adalah bahwa aktor tersebut dapat mengerti, mentaati, mematuhi dan berperan serta aktif dalam penegakan rambu-rambu dan etika pengembangan agrowisata.

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di kawasan agrowisata dan sekitarnya juga merupakan ciri keberhasilan dari sosialisasi pengembangan agrowisata di Kota Batu. Selanjutnya adalah berkembangnya usaha berbasis agribisnis dan agroindustri, baik dalam skala kecil, menengah dan besar yang juga berorientasi pada insdustri wisata di kawasan agrowisata dan tidak terjadi konversi lahan kawasan agrowisata secara tidak terkendali yang dapat merusak ekologi dan lingkungan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu didapatkan informasi bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu, bersama dengan pelaku bisnis adalah dengan mengundang pelaku wisata untuk berkumpul jika ada program pengembangan agrowisata yang ingin dikoordinasikan.

Masyarakat juga ikut dikumpulkan melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata. Perkumpulan pelaku wisata ini tidak dilakukan secara rutin melainkan sesuai kebutuhan. Kedepannya, perlu adanya pertemuan rutin yang dirancang khusus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk mengumpulkan berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur dan terjadwal, pemerintah akan lebih mudah untuk dapat memonitoring program-program dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Bumiaji dan kepala bidang ekonomi dan pembangunan Desa Bumiaji didapatkan informasi bahwasannya bantuan pemerintah kota Batu untuk pengembangan agrowisata pada Desa Bumiaji berupa alat produksi pertanian serta bahan-bahan teknis seperti pupuk dan vitamin tanaman. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa akses jalan serta *drainase* juga sarana prasarana dengan membangun Gedung Graha Wisata di Desa Bumiaji dimana Gedung Graha Wisata ini digunakan untuk pertemuan pengelola wisata di Desa Bumiaji.

Pemasaran dari hasil produksi petik apel buat dipasarkan sepenuhnya oleh masyarakat desa Bumiaji. Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa. Hasil olahan buah jeruk, buah apel, serta jambu menjadi pia, keripik, jenang dan sari buah oleh Desa Bumiaji disitribusikan tidak hanya di Kota Batu saja melainkan juga kota lain bahkan sampai di luar Jawa seperti Kalimantan.

Konsep *Collaborative Governance* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor agar desa

wisata dapat berkembang secara optimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata dimana tahun 2014 sebesar 60 Miliar naik menjadi 80 Miliar di tahun 2015.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pengembangan agrowisata adalah pendapatan masyarakat meningkat dari hasil usaha seperti usaha makanan, minuman dan pusat oleh-oleh di lingkungan kawasan destinasi wisata juga kegiatan masyarakat dapat ditunjang modalnya oleh pemerintah daerah dimana dana pendapatan asli daerah (PAD) juga disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat.

Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta dengan adanya kawasan agrowisata adalah meningkatnya keuntungan dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan agrowisata. Terkait hal tersebut tentu tidak hanya swasta yang mendapatkan keuntungan berupa materi, contohnya kawasan wisata Selecta yang ada di desa Tulungrejo dimana kawasan wisata

Selecta merupakan kawasan wisata milik masyarakat. Prosentase keuntungan dari kawasan wisata Selecta 30% untuk pemerintah dan 70% untuk swasta.

Adapun kendala dalam mengsinergikan peran masing-masing aktor dalam mengembangkan desa wisata di Kota Batu adalah perbedaan kebutuhan serta kepentingan dari beberapa *stakeholder*, khususnya dalam hal penyediaan lahan untuk pengembangan destinasi pariwisata Kota Batu. Pariwisata Kota Batu banyak dikelola oleh swasta dan masyarakat sedangkan peran pemerintah disini adalah merumuskan kebijakan pariwisata, membangun infrastruktur serta pembinaan kepada para pelaku sadar wisata dalam proses mengembangkan pariwisata Kota Batu. Maka dari itu, timbul beberapa kendala dalam pengembangan destinasi pariwisata seperti adanya sengketa kepemilikan lahan antar masyarakat dan swasta, sehingga banyak lahan yang tidak dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan desa wisata. Misalnya, pembangunan *rest area* yang terkendala hingga saat ini akibat sengketa kepemilikan lahan yang belum menemukan jalan tengahnya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh sebagai perumus kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat setelah adanya pengembangan agrowisata yang tersebar di tingkat desa hingga kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya itikad kuat pemerintah dalam membangun daerahnya, khususnya dalam hal ini adalah kawasan agrowisata Kota Batu yang dapat menghasilkan dampak sosial yang positif yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Batu secara luas dan merata.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendekatan *Collaborative Governance* digunakan oleh pemerintah Kota batu dalam mengembangkan desa wisata. Hal ini dapat terlihat dari adanya pola kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Batu dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media. Masing-masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Terdapat pola-pola komunikasi yang intens dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada para pelaku bisnis

berkaitan dengan program-program pengembangan agrowisata yang akan dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga diberdayakan melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata.

Konsep *Collaborative Governance* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor agar desa wisata dapat berkembang secara optimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata.

Untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata di Kota Batu diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk merumuskan program-program kerjasama yang dapat menarik partisipasi dari pihak swasta, masyarakat umum, akademisi dan media sehingga peran masing-masing aktor dapat diintegrasikan dalam pengembangan kawasan desa wisata.

Berbicara mengenai arah dan strategi pengembangan desa wisata di Kota Batu, pertumbuhan pasar agrowisata dan ekowisata cukup tinggi di seluruh dunia, maka dari itu

pengembangan desa wisata hal itu harus bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal dan berorientasi pasar.

Selain itu, dalam pengembangan desa wisata ini perlu ada kemudahan dan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta fasilitas lain seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.

### REFERENSI

- Faludi, A. (1973). The “systems view” and planning theory. *Socio-Economic Planning Sciences*.  
[https://doi.org/10.1016/0038-0121\(73\)90012-8](https://doi.org/10.1016/0038-0121(73)90012-8)
- Hadi, N. (2012). *Pengembangan Kawasan Agrowisata Sondokoro di Kabupaten Karanganyar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in perspective. *Planning Theory*.  
<https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). Collaborative policymaking: Governance through dialogue. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003>
- Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). Collaborative governance in the united states and korea: Cases in negotiated policymaking and service delivery. *International Review of Public Administration*.  
<https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805136>
- Kirana, C. A. D. (2017). *Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Batu (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Sedarmayanti. (2014). *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Refika Aditama.
- Windia, W. W. M. S. K. S. M. (2007). Model Pengembangan Agrowisata Di Bali. *Soca (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)*, Vol. 7.